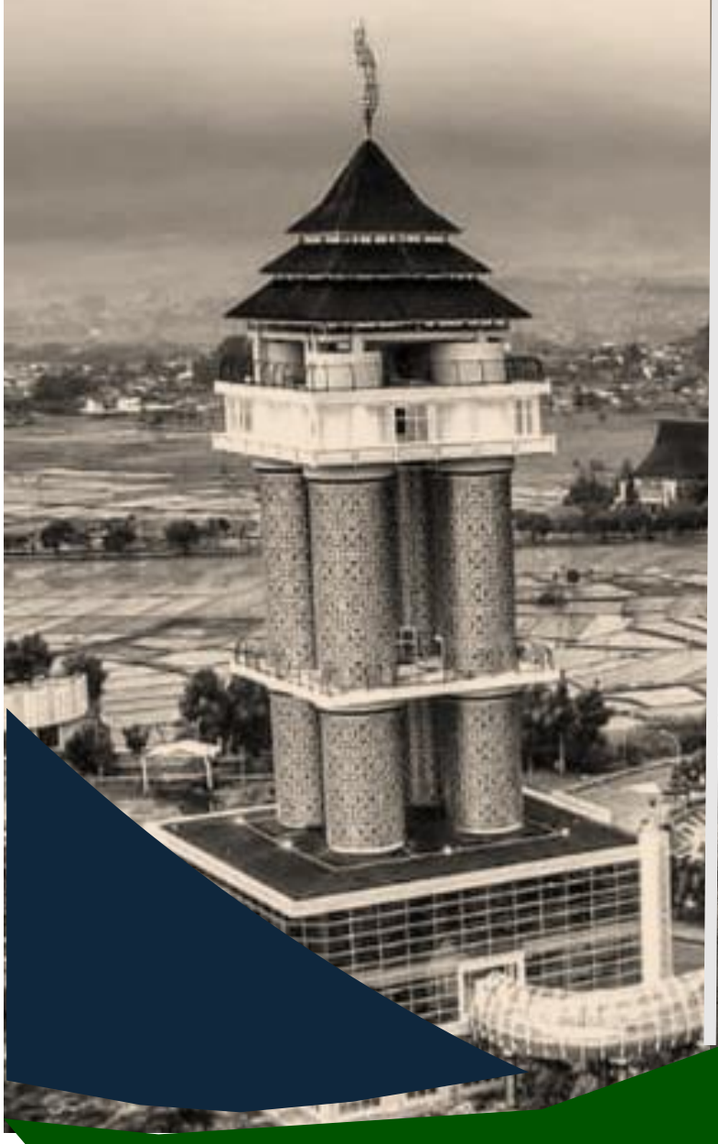




RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang melimpahkan berkat dan rahmat Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD ini terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 12 meliputi 3 Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing - masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2023 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Soreang, 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG



Ir. H. KAWALUDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196501071992031004

DAFTAR ISI

			Hal
Kata Pengantar …….			**i**
Daftar Isi ……			**ii**
BAB I	**PENDAHULUAN**		
	1.1.	Latar Belakang ……	1
	1.2.	Landasan Hukum ……	2
	1.3.	Maksud dan Tujuan ……	4
	1.4.	Sistematika ……	4
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**		
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun Lalu……	6
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP ……	26
	2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP……	32
	2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…….	34
BAB III	**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**		
	3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……	41
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Satpol PP ……...	42
	3.3	Program dan Kegiatan ……..……...	46
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ……..……..**		56
BAB V	**PENUTUP …….**		61

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu parallel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ini menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2023. Rencana Kerja PD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kabupaten Bandung tahun 2021–2026 yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera)**

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib

maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan Misi Keempat: **"Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional dan Tata Kehidupan Bermasyarakat yang berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan"** sebagai berikut.

TABEL 1.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP
TAHUN 2021-2026

Visi	Misi		Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera)	M4	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional dan Tata Kehidupan Bermasyarakat yang berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan	Terwujudnya Pelayanan terhadap warga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Pelaksanaan Layanan terhadap Warga Negara terdampak penegakan perda dan perkada

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja;

8. Permen dagri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2022

21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
23. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Nomor DL.03.01/703/Bappelitbangda Tanggal 7 Maret 2022 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar desa, antar wilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan daerah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah:

1. Terwujudnya Penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2023;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2 Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2021

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET KINERJA	REALISASI	PRESENTASE
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	**Nilai AKIP PD**	**78 point 100 persen**		
1	**5**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Kesesuaian Indikator Kinerja dalam Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang diselesaikan tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	100
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diselesaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang diselesaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja PD yang diselesaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100
1	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen CALK	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen	100

1	**5**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah dalam Database**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Asset	1 dokumen	1 dokumen	100
1	**5**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Rata-rata Capaian SKP ASN PD yang Memiliki Nilai >=80%**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai yang terpenuhi	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	695 stel	695 stel	100
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen P2KP ASN dan Non ASN PD	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	1 kali	1 kali	100
1	**5**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Ketersediaan Operasional Perkantoran**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	4 jenis	4 jenis	100
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	10 jenis	10 jenis	100
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dibeli	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang dibeli	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan berlangganan	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah peserta kunjungan tamu	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti dan yang diselenggarakan	12 bulan	12 bulan	100
1	**5**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 unit	-	-
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibeli	5 unit	-	-
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeuler yang dibeli	1 tahun	1 tahun	100
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	1 tahun	1 tahun	100
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana dan gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	12 bulan	100

1	**5**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air, dan listrik	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disew a atau diadakan	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	10 bulan	10 bulan	100
1	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Asset yang Baik**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang beroperasi	12 bulan	12 bulan	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak beroperasi	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat bengkel yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	1 tahun	100
1	**5**	**1**	2.13		**Penataan Organisasi**	**Tertatanya Administrasi Kepegawaian**	1 gedung	1 gedung	100
1	5	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 bulan	12 bulan	100
1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 persen**	**100 persen**	
1	**5**	**2**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	12 bulan	12 bulan	100
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	12 bulan	12 bulan	100
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten Bandung	12 bulan	12 bulan	100
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	12 bulan	100
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pelatihan, sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	12 bulan	12 bulan	100

1	5	2	2.01	7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraaan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	12 bulan	100
1	5	2	2.01	9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang harus Diselesaikan secara Tepat Waktu	12 bulan	12 bulan	100
1	**5**	**2**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Perda dan Perkada**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	100
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	100
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	100
1	**5**	**2**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	12 bulan	12 bulan	100

Walaupun secara umum capaian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan berhasil namun masih ada kegiatan yang capaian kinerjanya masih di bawah target. Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi diantaranya:

a. **Keterbatasan sumber daya anggota yang kompeten dari sisi jumlah maupun kualitas**. Pola pikir aparat yang kurang kreatif dan inovatif sehingga tugas yang dijalankan selalu berdasarkan perintah namun bukan karena inisiatif dan kebutuhan. Penggunaan paradigma lama yang melekat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban yang selalu dipadupadankan sehingga akan selalu menggunakan pendekatan lama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Dalam konteks ini lebih mengutamakan penyelenggaraan ketertiban sehingga akan sulit mendukung pencapaian ke-4yang berkaitan dengan tata kehidupan bermasyarakat (manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif).
b. **Dukungan politis terhadap Satpol PP** yang masih meletakan cara pandang organisasi ini hanya sebatas aktivitas rutin yang identik dengan hal-hal fisik belaka.

Program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2021 terdiri dari :

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) YANG DI EVALUASI		PRESENTASE KINERJA DAN ANGGARAN	
							K	RP	K	RP	K	RP
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP PD**	**78 poin**	**29.018.621.992**		**27.593.803.713**		**97,2**
1	**5**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Kesesuaian Indikator Kinerja dalam Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**100 persen**	**347.180.000**	**100 persen**	**339.857.893**	**100 persen**	**97,89**
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang diselesaikan tepat w aktu	3 dokumen	200.000.000	3 dokumen	192.679.000	100	96,3
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diselesaikan tepat w aktu	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	9.999.774	100	100,0
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	24.999.825	100	100,0
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang diselesaikan tepat w aktu	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	100	100,0
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	24.999.805	100	100,0
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja PD yang diselesaikan tepat w aktu	3 dokumen	35.000.000	3 dokumen	34.999.702	100	100,0
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	42.180.000	1 dokumen	42.179.787	100	100,0

1	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**100 persen**	**11.705.390.350**	**100 persen**	**10.674.517.543**	**100 persen**	**91,2**
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	11.589.390.350	12 bulan	10.558.517.543	100	91,1
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen CALK	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	65.000.000	100	100,0
1	5	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	100	100,0
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan yang diselesaikan secara tepat w aktu	1 dokumen	26.000.000	1 dokumen	26.000.000	100	100,0
1	**5**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah dalam Database**	**100 persen**	**69.149.280**	**100 persen**	**68.949.280**	**100 persen**	**99,7**
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	19.149.280	12 bulan	18.949.280	100	99,0
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Asset	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	100	100,0
1	**5**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegaw aian**	**Presentase Rata-rata Capaian SKP**	**100 persen**	**770.119.223**	**100 persen**	**765.678.600**	**100 persen**	**99,4**
					Perangkat Daerah	**ASN PD yang Memiliki Nilai >=80%**						
1	5	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw ai	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegaw ai yang terpenuhi	12 bulan	2.197.600	12 bulan	2.197.600	100	100,0
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	695 stel	725.921.623	695 stel	721.481.000	100	99,4
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegaw ai	Jumlah dokumen P2KP ASN dan Non ASN PD	2 dokumen	42.000.000	2 dokumen	42.000.000	100	100,0
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegaw ai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	1 kali	0	1 kali	-	100	

1	**5**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Ketersediaan Operasional Perkantoran**	**100 persen**	**765.199.983**	**100 persen**	**764.130.778**	**100 persen**	**99,9**
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	4 jenis	13.638.200	4 jenis	13.638.200	100	100,0
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	10 jenis	152.907.500	10 jenis	151.924.950	100	99,4
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dibeli	12 bulan	62.000.000	12 bulan	61.913.891	100	99,9
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang dibeli	12 bulan	154.038.283	12 bulan	154.038.283	100	100,0
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	12 bulan	181.439.000	12 bulan	181.439.000	100	100,0
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan berlangganan	25 jenis	51.816.000	25 jenis	51.816.000	100	100,0
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah peserta kunjungan tamu	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100	100,0
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti dan yang diselenggarakan	12 bulan	129.361.000	12 bulan	129.360.454	100	100,0
1	**5**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100 persen**	**1.437.884.796**	**100 persen**	**1.376.585.751**	**100 persen**	**95,7**
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	0 unit	0	0 unit	-	-	-
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibeli	0 unit	0	0 unit	-	-	-
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeuler yang dibeli	1 tahun	415.839.000	1 tahun	400.680.390	100	96,4
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	1 tahun	402.441.600	1 tahun	369.271.600	100	91,8
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana dan gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	400.000.000	12 bulan	397.660.000	100	99,4
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	219.604.196	12 bulan	208.973.761	100	95,2

1	**5**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran**	**100 persen**	**13.244.977.600**	**100 persen**	**12.972.926.449**		**97,9**
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air, dan listrik	12 bulan	60.120.000	12 bulan	54.573.185	100	90,8
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disew a atau diadakan	12 bulan	158.977.600	12 bulan	158.977.600	100	100,0
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	13.025.880.000	12 bulan	12.759.375.664	100	98,0
1	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Asset yang Baik**	**100 persen**	**648.720.760**	**100 persen**	**601.157.419**	**100 persen**	**92,7**
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang beroperasi	12 bulan	98.632.000	12 bulan	95.509.900	100	96,8
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak beroperasi	12 bulan	267.736.260	12 bulan	249.033.567	100	93,0
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat bengkel yang terpelihara	12 bulan	10.000.000	12 bulan	9.911.352	100	99,1
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	257.352.500	1 tahun	231.792.000	100	90,1
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	15.000.000	1 gedung	14.910.600	100	99,4
1	**5**	**1**	2.13		**Penataan Organisasi**	**Tertatanya Administrasi Kepegawaian**	**100 persen**	**30.000.000**	**100 persen**	**30.000.000**	**100 persen**	**100,0**
1	5	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.000.000	100	100,0

1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 persen**	**24.903.897.929**	**100 persen**	**24.883.032.739**	**100 persen**	99,9
1	**5**	**2**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100 persen**	**23.877.897.929**	**100 persen**	**23.857.202.539**	**100 persen**	**99,9**
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	12 bulan	5.676.325.079	12 bulan	5.676.325.079	100	100,0
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	12 bulan	200.000.000	12 bulan	199.979.800	100	100,0
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten Bandung	12 bulan	251.452.000	12 bulan	251.452.000	100	100,0
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	11.667.843.170	12 bulan	11.662.918.100	100	100,0
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pelatihan, sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	12 bulan	849.371.680	12 bulan	849.371.680	100	100,0

1	5	2	2.01	7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraaan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	4.797.100.000	12 bulan	4.797.100.000	100	100,0
1	5	2	2.01	9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang harus Diselesaikan secara Tepat Waktu	12 bulan	250.000.000	12 bulan	249.799.980	100	99,9
1	5	2	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	12 bulan	185.806.000	12 bulan	170.255.900	100	91,6
1	**5**	**2**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Perda dan Perkada**	**100 persen**	**936.000.000**	**100 persen**	**935.830.200**	**100 persen**	**100,0**
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 bulan	133.533.300	12 bulan	133.533.300	100	100,0
1	5	2	2.02	2	Pengaw asan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengaw asan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 bulan	350.000.000	12 bulan	350.000.000	100	100,0
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	12 bulan	452.466.700	12 bulan	452.296.900	100	100,0
1	**5**	**2**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**100 persen**	**90.000.000**	**100 persen**	**90.000.000**	**100 persen**	**100,0**
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000	100	100,0
TOTAL								**53.922.519.921**		**52.476.836.452**		**97**

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026

Kabupaten Bandung

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja Renstra Satpol PP s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Satpol PP Tahun 2022	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP PD**	**78,50 point 100 persen**		**78 point 100 persen**			**78,50 point 100 persen**	**78,50 point 100 persen**	
1	**5**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Kesesuaian Indikator Kinerja dalam Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang diselesaikan tepat w aktu	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	**100 persen**
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diselesaikan tepat w aktu	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	**100 persen**
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	**100 persen**
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang diselesaikan tepat w aktu	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	**100 persen**
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	**100 persen**
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja PD yang diselesaikan tepat w aktu	1 Laporan		1 dokumen	1 dokumen	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 dokumen	1 dokumen	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**

1	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**100 Persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 persen**
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan		12 bulan	12 bulan	100	64 orang/ bulan	64 orang/ bulan	**100 persen**
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen CALK	1 Laporan		1 dokumen	1 dokumen	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	5	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	**100 persen**
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan yang diselesaikan secara tepat w aktu	18 Laporan		3 dokumen	3 dokumen	100	18 Laporan	18 Laporan	**100 persen**
1	**5**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah dalam Database**	**100 Persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 persen**
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Asset	1 Laporan		1 dokumen	1 dokumen	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	**5**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Rata-rata Capaian SKP ASN PD yang Memiliki Nilai >=80%**	**100%**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**	**100%**	**100 persen**
1	5	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw ai	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegaw ai yang terpenuhi	2 Unit		12 bulan	12 bulan	100	2 Unit	2 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	1 Paket		695 stel	695 stel	100	1 Paket	1 Paket	**100 persen**
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegaw ai	Jumlah dokumen P2KP ASN dan Non ASN PD	1Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	**100 persen**
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegaw ai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	64 orang		1 kali	1 kali	100	64 orang	64 orang	**100 persen**
1	**5**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Ketersediaan Operasional Perkantoran**	**100%**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**	**100%**	**100 persen**
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	1 Paket		4 jenis	4 jenis	100	1 Paket	1 Paket	**100 persen**
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	1 Paket		10 jenis	10 jenis	100	1 Paket	1 Paket	**100 persen**
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dibeli	1 Paket		12 bulan	12 bulan	100	1 Paket	1 Paket	**100 persen**
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang dibeli	1 Paket		12 bulan	12 bulan	100	1 Paket	1 Paket	**100 persen**
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	1 Paket		12 bulan	12 bulan	100	1 Paket	1 Paket	**100 persen**

1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan berlangganan	Dokumen		12 bulan	12 bulan	100	2 dokumen	2 dokumen	**100 persen**
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah peserta kunjungan tamu	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti dan yang diselenggarakan	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	**5**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 unit		2 unit	-	-	2 unit	2 unit	**100 persen**
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibeli	5 unit		5 unit	-	-	5 unit	5 unit	**100 persen**
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeuler yang dibeli	2 Unit		1 tahun	1 tahun	100	2 Unit	2 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	1 Unit		1 tahun	1 tahun	100	1 Unit	1 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana dan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit		12 bulan	12 bulan	100	1 Unit	1 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Unit		12 bulan	12 bulan	100	5 Unit	5 Unit	**100 persen**
1	**5**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran**	**100 Persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air, dan listrik	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disew a atau diadakan	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan		10 bulan	10 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Asset yang Baik**	**100 Persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 persen**
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang beroperasi	21 Unit		12 bulan	12 bulan	100	21 Unit	21 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak beroperasi	35 Unit		12 bulan	12 bulan	100	35 Unit	35 Unit	**100 persen**

1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebeul	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Unit		12 bulan	12 bulan	100	2 Unit	2 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat bengkel yang terpelihara	20 Unit		12 bulan	12 bulan	100	20 Unit	20 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit		1 tahun	1 tahun	100	1 Unit	1 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	1 Unit		1 gedung	1 gedung	100	1 Unit	1 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.09	11	Peliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		12 bulan	12 bulan	100	5 Unit	5 Unit	**100 persen**
1	**5**	**1**	2.13		**Penataan Organisasi**	**Tertatanya Administrasi Kepegawaian**					-	-	-	-
1	5	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan					-	-	-	-
1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
1	**5**	**2**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	20 Kasus		12 bulan	12 bulan	100	20 Kasus	20 Kasus	**100 persen**
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	20 Kasus		12 bulan	12 bulan	100	20 Kasus	20 Kasus	**100 persen**
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten Bandung	1 Dokumen		12 bulan	12 bulan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	**100 persen**

1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		12 bulan	12 bulan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	**100 persen**
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pelatihan, sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	457 Orang		12 bulan	12 bulan	100	457 Orang	457 Orang	**100 persen**
1	5	2	2.01	6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraaan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		12 bulan	12 bulan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	**100 persen**
1	5	2	2.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	115 Unit		-	-	-	115 Unit	115 Unit	**100 persen**
1	5	2	2.01	9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang harus Diselesaikan secara Tepat Waktu	1 Dokumen		12 bulan	12 bulan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	**100 persen**
1	5	2	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	**5**	**2**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Perda dan Perkada**	**100 Persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 persen**
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	5	2	2.02		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	**5**	**2**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**100 Persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 persen**
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**

2. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023 (Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021)

Sedangkan Rencana Kerja untuk tahun 2023 terurai menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa untuk Program Kegiatan yang terbagi ke dalam 2 Program, 9 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2022.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi Kabupaten Bandung "Terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera)" dan misi nomor empat yaitu Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi Yang Profesional, dan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai – nilai Keagamaan", pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung mendukung misi keempat Kabupaten Bandung. Untuk mencapai misi keempat tersebut, sesuai dengan Tugas yaitu :

1) Menegakkan Perda dan Perkada;
2) Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman; dan
3) Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat

1. Fungsi, yaitu :
   1) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat;
   2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat;
   3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelengaraan ketertiban umumdan ketenraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;

4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

5) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan yaitu :

1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga negara masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaraan atas Perda dan / atau Perkada; dan

4) Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

a. Belum optimalnya dukungan masyarakat Kabupaten Bandung dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

b. Rasio Tenaga Pengamanan kenyamanan lingkungan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung belum terpenuhi secara optimal.

c. Rasio Kebutuhan Anggota Linmas 1 Anggota / RT belum dapat direalisasikan secara optimal mengingat keterbatasan anggaran daerah yang tidak berorientasi pada pengadaan Anggota Satlinmas.

d. Masih kurangnya tenaga PPNS maupun tenaga yang handal sebagai pendukung Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dikaitkan dengan pembentukan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan di Kabupaten Bandung.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Tugas, Fungsi dan Kewenangannya, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dimana hal – hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas Anggota Satpol PP.
   b. Peningkatan kemampuan teknis Anggota satpol PP dan Linmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pelindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
   c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
   d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.

2. Mendorong Aparat dan Masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pelindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan dengan arah kebijakan:

a. Membangun kemampuan dan kolektifitas Aparatur dan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan ketertibanumum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
c. Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non pemerintah.

3. Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan:
    a. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
    b. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan
    c. Pelindungan masyarakat.

4. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kabupaten Bandung dengan arah kebijakan:
        a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong

terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.

b. Menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya, antar SKPD dan masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24) dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 tahun 2012 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM.17 Soreang Kabupaten Bandung. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat Satpol PP Kabupaten Bandung, Merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsure Penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Sub Tugas yaitu :

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Satuan yang meliputi Kesekretariatan , Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat, berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung serta dokumen Perencanaan Satuan.
b. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), PEnyusunan indicator kinerja utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian kinerja, Proses Bisnis (Probis), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar pelayanan (SP) Satuan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan pertanggungjawaban akhir masa kerja Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaksanaan dan pelaporan kinerja lainnya.
c. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelnggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umu.
d. Menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

e. Menyelenggarakan perancangan dan pengembangan system informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan Satuan.
f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing.
g. Memantau pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas
h. Mengarahkan dan menegndalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja Satuan
i. Membina bawahan sesuai dengan ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan
j. Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk ditanda tangani
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut
l. Melaporkan pelaksanaan tugas Satuan secara Lisan, tertulis , berkala atau sesuai kebutuhan kepada pemimpin
m. Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Dinas
n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan program dan kegiatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2023, ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan salah satunya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adanya Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pengganti Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga adanya perubahan tata cara pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum khususnya pada Satpol PP dari segi pendataan terhadap warga negara yang bakal terdampak dari penegakan Perda dan Perkada.

Terdapat 4 mutu pelayanan dasar sub urusan Trantibum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, diantaranya meliputi:

a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat; dan
d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Keempat mutu pelayanan dasar tersebut akan dilaksanakan oleh Satpol PP pada kegiatan dan sub kegiatan berikut ini:

Tabel 2.4
Rincian Mutu Pelayanan Dasar dalam Kegiatan/Sub Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

No	Mutu Pelayanan Dasar	Kode Rekening/ Sub Kegiatan	Anggaran
1	Standar operasional prosedur Satpol PP	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	45.000.000
2	Standar sarana prasarana Satpol PP	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	45.000.000

3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	650.000.000
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	112.500.000

Berdasarkan mutu pelayanan dasar SPM pada Satpol PP di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Untuk Standar Operasional Prosedur Satpol PP memiliki 82 SOP.
b. Pada Sarana Prasarana Satpol PP kekurangan kendaraan operasional untuk melaksanakan patroli wilayah dalam penegakan Perda dan Perkada.
c. Dari segi peningkatan Anggota Satpol PP memiliki anggaran rutin bagi pengembangan kapasitas.
d. Adapun layanan terhadap warga yang terkena dampak gangguan Trantibum dari penegakan Perda dan Perkada, pada tahun 2021 Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tidak terjadinya kecelakaan orang maupun kerusakan barang sehingga target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang 0 (nol) ganti rugi tercapai.

Analisis kinerja pelayanan Satpol PP menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018, dengan sasaran target sesuai Renstra Satpol PP dan/atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bandung

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Presentase Layanan terhadap warga negara yang terdampak perda dan perkada	SPM	-	100%	100%	100%	-	50%	100%	100%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Sejak dibentuk pada tahun 1950 dengan terbitnya peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana dan terakhir di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Tugas, Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Serta Dengan Pembentukan Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu menjadi 4 bidang 3 seksi masing-masing bidangnya :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi pamong Praja dibantu oleh, yaitu:

a. Bidang Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
b. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
c. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur;
d. Bidang Perlindungan Masyarakat;

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya dukungan masyarakat Kabupaten Bandung dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
2. Rasio Tenaga Pengamanan kenyamanan lingkungan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung belum terpenuhi secara optimal.
3. Rasio Kebutuhan Anggota Linmas 1 Anggota / RT belum dapat direalisasikan secara optimal mengingat keterbatasan anggaran daerah yang belum cukup berorientasi pada pengadaan Anggota Satlinmas.
4. Masih kurangnya tenaga PPNS maupun tenaga yang handal sebagai pendukung Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum,

Ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dikaitkan dengan pembentukan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan di Kabupaten Bandung. Pemasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung terutama misi keempat. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sebelumnya *responsive* (tanggap darurat) menjadi *preventif* (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dalam pelaksanaannya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung

1. Peningkatan kapasitas seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, melalui pelatihan dan bimtek.
2. Tambahan Tenaga Pendukung Sumber Daya Manusia (Aparatur) dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung segera dapat

direalisasikan. Apalagi telah terbentuknya unit pelaksanaan Satpol PP Kecamatan di Kabupaten Bandung.

3. Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD yang bersinggungan dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan kenyamanan lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan, secara cepat, tepat, tegas dan ikhlas. Upaya yang digunakan dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan dan upaya lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Satpol PP.
5. Masih terdapat program yang dilaksanakan oleh bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Merupakan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan.

2.4 Review Terhadap RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bandung. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka penjang tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung belum menjadi kebijakan utuh Pemerintah Kabupaten Bandung karena masih menjadi bagian dalam kebijakan Kesbangpol. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung sesuai dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bandung untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah membutuhkan personil, sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiayai program maupun kegiatan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun oleh instansi tingkat Provinsi maupun pusat.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2023

Kabupaten Bandung

KODE						Pagu Rancangan Tahun 2023				Hasil Analisis Kebutuhan					
						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**0**	**0**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**79 point 100 persen**	**24.533.127.172,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bandung	**Nilai AKIP**	**79 point 100 persen**	**27.519.597.172,00**	
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,01**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**100 persen**	**330.480.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**100 persen**	**330.480.000,00**	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	134.980.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	134.980.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	17.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	17.000.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	31.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	31.500.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	12.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	12.000.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	22.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	22.500.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	55.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	55.000.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	57.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	57.500.000,00	

1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,02**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen keuangan**	**100 Persen**	**12.539.055.300,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase ketersediaan dokumen keuangan**	**100 Persen**	**12.539.055.300,00**	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	12.431.055.300,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	12.431.055.300,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	31.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	31.500.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	45.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	45.000.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	31.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	31.500.000,00	
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,03**	**0**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database**	**100 Persen**	**63.500.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database**	**100 Persen**	**63.500.000,00**	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.500.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.500.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,05**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%**	**100%**	**547.500.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%**	**100%**	**547.500.000,00**	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw ai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw ai	2 Unit	22.500.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw ai	Kab. Bandung	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw ai	2 Unit	22.500.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	393.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	393.000.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegaw ai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegaw ai	1Dokumen	15.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegaw ai	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegaw ai	1Dokumen	15.000.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 orang	117.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 orang	117.000.000,00	
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,06**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran.**	**100%**	**1.175.221.872,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran.**	**100%**	**1.175.221.872,00**	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	339.937.398,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	339.937.398,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	41.519.835,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	41.519.835,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.934.285,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.934.285,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	93.930.354,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	93.930.354,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	45.900.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	45.900.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	13.500.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	13.500.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	598.500.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	598.500.000,00	

1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,07**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**-**	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	-	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	-	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	-	Pengadaan Mebel	Kab. Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	-	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,08**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran**	**100 Persen**	**9.270.410.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran**	**100 Persen**	**12.256.880.000,00**	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	75.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	75.000.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..01	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.175.410.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.161.880.000,00	
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,09**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan aset yang baik**	**100 Persen**	**606.960.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase ketersediaan aset yang baik**	**100 Persen**	**606.960.000,00**	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	223.200.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	223.200.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	334.800.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	334.800.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	22.500.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bandung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	22.500.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	-	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.960.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.960.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.500.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.500.000,00	
						Jumlah 1			**24.533.127.172,00**	**Jumlah 1**				**27.519.597.172,00**	

1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum**	**100 persen**	**27.395.973.128,00**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kab. Bandung	**Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum**	**100 persen**	**33.231.173.128,00**	
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**2**	**2,01**	**0**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**100 persen**	**26.584.973.128,00**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bandung	**Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**100 persen**	**32.420.173.128,00**	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	20 Kasus	5.082.442.400,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Kab. Bandung	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	20 Kasus	5.082.442.400,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	20 Kasus	207.576.000,00	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Bandung	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	20 Kasus	207.576.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	333.350.910,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	333.350.910,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	15.137.458.818,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	20.972.658.818,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	457 Orang	650.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Bandung	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	457 Orang	650.000.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	4.971.645.000,00	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	4.971.645.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	115 Unit	45.000.000,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	115 Unit	45.000.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	45.000.000,00	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	45.000.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	112.500.000,00	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	112.500.000,00	

1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**2**	**2,02**	**0**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Perda dan Perkada**	**100 Persen**	**730.000.000,00**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Kab. Bandung	**Persentase Penegakan Perda dan Perkada**	**100 Persen**	**730.000.000,00**	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 Laporan	230.000.000,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 Laporan	230.000.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	250.000.000,00	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	250.000.000,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	250.000.000,00	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	250.000.000,00	
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**2**	**2,03**	**0**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**100 Persen**	**81.000.000,00**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Kab. Bandung	**Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**100 Persen**	**81.000.000,00**	
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	81.000.000,00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	81.000.000,00	
						Jumlah 2			**27.395.973.128,00**	**Jumlah 2**				**33.231.173.128,00**	
						Jumlah Total			**51.929.100.300,00**	**Jumlah Total**				**60.750.770.300,00**	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2023. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (Ranhir RKP) Tahun 2023 memuat 14 prioritas dimana prioritas diantaranya meningkatkan keamanan wilayah, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu "Penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung masuk dalam misi ke-empat yaitu **"Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional dan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan nilai-nilai Keagamaan".** Untuk mendukung pencapaian misi ke-empat Kabupaten Bandung serta tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, disusunlah tiga strategi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung yaitu:

1. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Pelindungan Masyarakat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja` Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung. Untuk itu, disusun tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021-2026.

TABEL 3.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP
TAHUN 2021-2026

Visi	Misi		Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera)	M4	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional dan Tata Kehidupan Bermasyarakat yang berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan	Terwujudnya Pelayanan terhadap warga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Pelaksanaan Layanan terhadap Warga Negara terdampak penegakan perda dan perkada

Untuk itu diperlukan tindakan nyata dalam bentuk progress kedepan agar sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.
3. Memberdayakan Satpol PP dan PPNS menuju profesionalisme pengabdian dalam pelaksanaan tugas.
4. Menjalin kerjasama dengan aparat lainnya, serta berkoordinasi dan menjalin kemitraan dengan Polres, Kodim, Polsek dan Koramil di wilayah Kabupaten Bandung dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Meningkatkan koordinasidengan SKPD lainnya dalam hal penegakan disiplin aparatur.

Adapun hal-hal yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 untuk program dan kegiatan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya potensi kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Bandung.
b. Tersedianya daya dukung yang memungkinkan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.
c. Meningkatnya Aparatur Satpol PP dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.
d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Perundang–undangan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan,yaitu :

1. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.
2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.
3. Pemetaan kawasan rawan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Optimalisasi peran anggota Linmas.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung mencakup kepada tugas pokok dan fungsi Satpol PP itu sendiri yaitu menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan sasaran dan tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Sebagai berikut:

TABEL 3.2

MATRIKS KETERKAITAN TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera).			
MISI 4 : Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Terwujudnya Pelayanan terhadap warga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Pelaksanaan Layanan terhadap Warga Negara terdampak penegakan perda dan perkada	Meningkatkan Upaya Pre-emtif, Preventif, dan Represif atas Pelanggaran Perda/Perkada dan Peraturan Pelaksanaannya	1. Peningkatan Kuantitas dan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah 2. Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lainnya
		Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Peningkatan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		Meningkatkan Sinergitas Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan Satlinmas	1. Peningkatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Unsur Rakyat Terlatih Lainnya 2. Peningkatan Kemampuan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
		Meningkatkan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP	1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penyidik PNS 2. Peningkatan Kualitas Teknis Anggota Satpol PP 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol PP

2.3 Program dan Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat. Maka program dan Kegiatannya sebagai berikut :

KODE						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**0**	**0**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,01**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,02**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen keuangan**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD

1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,03**	**0**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,05**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,06**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran.**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,07**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,08**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..01	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,09**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan aset yang baik**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
						Jumlah 1	
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum**
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**2**	**2,01**	**0**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**2**	**2,02**	**0**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Perda dan Perkada**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**2**	**2,03**	**0**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2,03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung

KODE						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**0**	**0**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**79 point 100 persen**	**24.533.127.172,00**	**79,50 point 100 persen**	**24.518.127.172,00**
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**100 persen**	**330.480.000,00**	**100 persen**	**330.480.000,00**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	134.980.000,00	2 dokumen	134.980.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	17.000.000,00	1 dokumen	17.000.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	31.500.000,00	1 dokumen	31.500.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	12.000.000,00	1 dokumen	12.000.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	22.500.000,00	1 dokumen	22.500.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	55.000.000,00	1 Laporan	55.000.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	57.500.000,00	1 Laporan	57.500.000,00

1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen keuangan**	**100 Persen**	**12.539.055.300,00**	**100 Persen**	**12.539.055.300,00**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	12.431.055.300,00	64 orang/bulan	12.431.055.300,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	31.500.000,00	1 Laporan	31.500.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	45.000.000,00	1 dokumen	45.000.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	31.500.000,00	18 Laporan	31.500.000,00
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2**	**0**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database**	**100 Persen**	**63.500.000,00**	**100 Persen**	**63.500.000,00**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.500.000,00	1 Laporan	13.500.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,1**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%**	**100%**	**547.500.000,00**	**100%**	**532.500.000,00**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw ai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw ai	2 Unit	22.500.000,00	2 Unit	22.500.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	393.000.000,00	1 Paket	393.000.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	5	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegaw ai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegaw ai	1Dokumen	15.000.000,00	1Dokumen	-
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 orang	117.000.000,00	64 orang	117.000.000,00
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,1**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran.**	**100%**	**1.175.221.872,00**	**100%**	**1.175.221.872,00**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00	1 Paket	9.000.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	339.937.398,00	1 Paket	339.937.398,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	41.519.835,00	1 Paket	41.519.835,00

1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.934.285,00	1 Paket	32.934.285,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	93.930.354,00	1 Paket	93.930.354,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	45.900.000,00	2 Dokumen	45.900.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	13.500.000,00	1 Laporan	13.500.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	598.500.000,00	1 Laporan	598.500.000,00
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,1**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**-**	**100 Persen**	**-**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	-	2 unit	-
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	-	5 unit	-
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	-	2 Unit	-
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	5 Unit	-
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,1**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran**	**100 Persen**	**9.270.410.000,00**	**100 Persen**	**9.270.410.000,00**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	75.000.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..01	1	2,1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.175.410.000,00	1 Laporan	9.175.410.000,00

1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**1**	**2,1**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan aset yang baik**	**100 Persen**	**606.960.000,00**	**100 Persen**	**606.960.000,00**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	223.200.000,00	21 Unit	223.200.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	334.800.000,00	35 Unit	334.800.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	22.500.000,00	2 Unit	22.500.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	-	20 Unit	-
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	1 Unit	-
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.960.000,00	1 Unit	21.960.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	1	2,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.500.000,00	5 Unit	4.500.000,00
						Jumlah 1			**24.533.127.172,00**		**24.518.127.172,00**
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum**	**100 persen**	**27.395.973.128,00**	**100 persen**	**27.395.973.128,00**
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**2**	**2**	**0**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**100 persen**	**26.584.973.128,00**	**100 persen**	**26.584.973.128,00**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	20 Kasus	5.082.442.400,00	20 Kasus	5.082.442.400,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	20 Kasus	207.576.000,00	20 Kasus	207.576.000,00

1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	333.350.910,00	1 Dokumen	333.350.910,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	15.137.458.818,00	1 Dokumen	15.137.458.818,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	457 Orang	650.000.000,00	457 Orang	650.000.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2	6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	4.971.645.000,00	1 Dokumen	4.971.645.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	115 Unit	45.000.000,00	115 Unit	45.000.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2	9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	45.000.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	112.500.000,00	1 Laporan	112.500.000,00
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**2**	**2**	**0**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Perda dan Perkada**	**100 Persen**	**730.000.000,00**	**100 Persen**	**730.000.000,00**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 Laporan	230.000.000,00	1 Laporan	230.000.000,00
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00

1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.5..00**	**2**	**2**	**0**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**100 Persen**	**81.000.000,00**	**100 Persen**	**81.000.000,00**
1	5	1.05.0.00.0.00.5..00	2	2	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	81.000.000,00	1 Laporan	81.000.000,00
						Jumlah 2			**27.395.973.128,00**		**27.395.973.128,00**
						Jumlah Total			**51.929.100.300,00**		**51.914.100.300,00**

Soreang 9 Mei 2022

Mengetahui/Menyetujui	Telah Diverifikasi	a.n Kepala Bappelitbangda
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Verifikator Fungsional Perencana Ahli Muda	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
Ir. H. KAWALUDIN, MM	**AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.Si**	**LILIS ROSTINI, SH., MH**
NIP. 19660107 199203 1 004	NIP. 19761213 201001 1 002	NIP.19781211 200501 2 009

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung adalah sebagai SKPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang –undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Sejalan dengan Misi Ke-empat Kabupaten Bandung, maka program dan kegiatan yang dirancang pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2023 terdiri dari :

Tabel IV.1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**24.533.127.172,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**330.480.000,00**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	134.980.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	31.500.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	22.500.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.000.000,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.500.000,00

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**12.539.055.300,00**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.431.055.300,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.500.000,00
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	45.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD	31.500.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**63.500.000,00**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.500.000,00
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**547.500.000,00**
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw ai	22.500.000,00
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	393.000.000,00
		Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegaw ai	15.000.000,00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	117.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**1.175.221.872,00**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	339.937.398,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.519.835,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.934.285,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	93.930.354,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.900.000,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	598.500.000,00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**-**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
		Pengadaan Mebel	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**9.270.410.000,00**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.175.410.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**606.960.000,00**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	223.200.000,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	334.800.000,00
		Pemeliharaan Mebel	22.500.000,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.960.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.500.000,00
Jumlah 1			**24.533.127.172,00**

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**27.395.973.128,00**
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**26.584.973.128,00**
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	5.082.442.400,00
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	207.576.000,00
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	333.350.910,00
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.137.458.818,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	650.000.000,00
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.971.645.000,00
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	45.000.000,00
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	45.000.000,00
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	112.500.000,00

	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		**730.000.000,00**
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	230.000.000,00
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	250.000.000,00
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	250.000.000,00
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		**81.000.000,00**
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	81.000.000,00
Jumlah 2			**27.395.973.128,00**
Jumlah Total			**51.929.100.300,00**

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*Stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2023 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.

Soreang, 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG

ttd

KAWALUDIN

BUPATI BANDUNG

M. DADANG SUPRIATNA

FORMULIR E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2023

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Sesuai
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyusun agenda kerja.	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	√			
6	Penelaahan Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota.	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.		√		
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.				
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Surat Edaran Bupati/Wali Kota.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan, dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah				

	dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.				
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota telah Menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disyahkan.				

Soreang, 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG

Ir. H. KAWALUDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP.196601071992031004

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Raya Soreang Km.17 Telp./Fax. (022) 5891634 Soreang 40912
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, E-mail : satpolpp@bandungkab.go.id
Website : www.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 800/2751/Pol.PP/2021
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, perlu disusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung;

b. bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Bandung;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022;
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Struktur Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran dalam Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2023 adalah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2023 dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan yang telah ditetapkan;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 01 Desember 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Ir. H. KAWALUDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196501071992031004

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung
Nomor : 800/2751/Pol.PP/2021
Tanggal : 01 Desember 2021
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2023

Penanggungjawab : Kepala Satpol PP
Ketua Tim : Sekretaris Satpol PP
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program
Tim Pelaksana :
1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
3. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Aparatur
4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Kepala Sub Bagian Keuangan
7. Fungsional Satpol PP
8. Staff pada Sub Bagian Program

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 01 Desember 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG

Ir. H. KAWALUDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196501071992031004